BAB I

Gambaran Umum PT. PLN (Persero)

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

1.1.Sejarah berdirinya PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

1.1.1. Jaman Belanda

Menurut berbagai keterangan yang ditemukan, menyatakan bahwa cahaya listrik mulai masuk di Indonesia sekitar abad ke-19 yaitu pada zaman penjajahan Hindia Belanda. Di tahun 1905 di Jawa Barat Khususnya di kota Bandung berdiri perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan public. Nama perusahaan itu adalah **Bandoengsche Electriciteit Maatschappij (BEM).** Dalam perjalanannya, BEM pada 1 januari 1920 berubah menjadi perusahaan Perseroan menjadi Gemeenschapplijk Electricteit Bedrijf Voor Bandoeng (GEBEO) yang pendirinya dikukuhkan melalui akte notaries Mr.Andrian Hendrik Van aphuise dengan no : 213 tanggal31 Des 1919.

1.1.2. Jaman Jepang

Setelah kekuasaan Penjajahah Beralih ke tangan pemerintahan Jepang, diantara rentang waktu 1942-1945. Perindustrian tenaga listrik dilaksanakan oleh Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha dengan wilayah kerja diseluruh Pulau Jawa. Sejarah Kembali mencatat dengan rapih, perjuangan fisik kemerdekaan berhasil membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan.

1.1.3. Jaman setelah Proklamasi Kemerdekaan sampai sekarang

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tiba saat penyerahan kedaulatan dari pemerintahan Hindia Belanda kepada Republik Indonesia.

Tahun 1957 merupakan titik tolak dan awal dari pengelolaan dan penguasaan perlistrikan di seluruh Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia, karena pada tahun tersebut dimulai adanya Nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Maka pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh pemerintah RI yang dikukuhkan dengan peraturan pemerintah No. 86 tahun 1958 Jo Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda yang pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.67 Tahun 1961 dibentuk Badan Pemimpin umum Perusahaan Listrik Negara (BPI-PLN), sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Kemudian istilah PLN Bandung diganti menjadi PLN Exploitas XI sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat.

Sejarah kelistrikan di Jawa Barat terus berkembang sejalan dengan perubahan dan perkembangan daerah yang terus terjadi memasuki era 1990an dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun1994 tanggal 16 Juni 1994. Untuk memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan kelistrikan yang dari tahun ketahun cenderung mengalami peningkatan, maka keluarlah Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.28/010/DRI/2001

Tanggal 20 Februari 2001. Yang menjadi landasan hukum perubahan nama PT. PLN (Persero). Distribusi Jawa Barat pada akhirnya, dengan mengacu keputusan Direksi PT.PLN (Persero) unit Nomor : 120k/010/ DIR 2002 tanggal 27 Agustus 2002 PT. PLN (Persero) unit Bisnis distribusi Jawa Barat dan berubah lagi namanya menjadi PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, dimana wilayah kerjanya meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten hinga saat ini.

1.2. Visi, Misi Filosofi dan Tujuan PT. PLN (PERSERO) DJBB

A. Visi Perusahaan.

"Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang tumbuh berkembang, unggul dan terpercaya engan bertumpu pada potensi insani."

B. Misi Perusahaan.

1. Melakukan bisnis kelistrikan dan bidang usaha terkait yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, karyawan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

C. Filosofi Perusahaan.

Filosofi adalah landasan utama sebagai keyakinan untuk mewujudkan misi dan visi perusahaan, landasan filosofi PLN unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah:

"Mempunyai Komitmen yang tinggi terhadap kepentingan pelanggan dengan mendasari SDM sebagi sumber daya penting perusahaan."

D. Tujuan Perusahaan.

Tujuan PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dan Banten dalam melakukan restrukturisasi ini adalah pertama untuk meningkatkan efisiensi dan kedua kepuasan pelangan meningkat, dapat diuraikan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang sebagai berikut:

Tujuan Jangka Pendek.

a. Mempercepat pemulihan kesehatan keuangan perusahaan.
b. Membentuk Unit Pelayanan Pelanggan (UPP) sebanyak 76 unit migrasi dari rating/rayon yang ada, dan sebagai pilot projek ditetapkan 2 unit yaitu UPP Bandung Timur dan UPP Padalarang.
c. Membentuk Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) sebanyak 15 unit migrasi dari Wire Cabang (Bagian Distribusi dan Bagian Konstruksi).
d. Pilot proyek dalam mendirikan UPP dan UPJ yaitu cabang Bandung, cabang Majalaya, cabang Cimahi (BMC), koordinasi oleh tim BMC.

e. Menyiapkan 1 Unit Arena Bandung Raya (Embrio UPD) Bandung, Bale Endah, Cimahi dan Sumedang.

f. Menyiapkan PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat menjadi UBD dengan organisasi yang baru, rekayasa ulang bisnis proses, mekanisme niaga persiapan SDM dan IT.

Tujuan Jangka Menengah

1. Meningkatkan Kesehatan keuangan Perusahaan.
2. Melaksanakan proses transformasi organisasi melalui pembentukan 1 area yang membawahi UPJ-UPJ se Bandung Raya.
3. Menyiapkan UPP baru sesuai perkembangan yang ada.
4. Menyiapkan 4 area lainnya yaitu Bogor, Karawang/Bekasi, Cirebon dan Banten.
5. Memberdayakan SDM dan IT untuk rekayasa ulang bisnis proses mekanisme niaga dan sistem manajemem yang terpadu antara UPP, UPJ, AREA dan UBD Jawa Barat.

Tujuan Jangka Panjang

a. Meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan yang siap menyongsong era kompetensi.

UNIKOM

b. Melaksanakan proses transformasi organisasi melalui:
   1. Pembentukan 5 area yang membawa UPJ-UPJ.
   2. Pembentukan 15 unit Pelayanan Pelanggan (UPP).
   3. Pembentukan 84 unit pelayanan Pelanggan (UPP).
c. Memperdaya SDM dan IT untuk rekayasa ulang bisnis proses, mekanisme niaga dan sistem manajemen.
d. Menyampaikan pembentukan unit *Non Core Business*.
e. Mentransformasi UBD Jawa Barat dan Banten menjadi anak perusahaan (diperkirakan setelah tahun 2005).

1.3. Logo PT. PLN (PERSERO) DJBB

Logo atau lambang merupakan bagian dari identitas perusahaan (*corporate identity*), sedangkan yang di maksud dengan identitas perusahaan adalah suatu cara atau suatu hal yang memungkinkan perusahaan dapat dikenal dan dibedakan dari perusahaan lain.

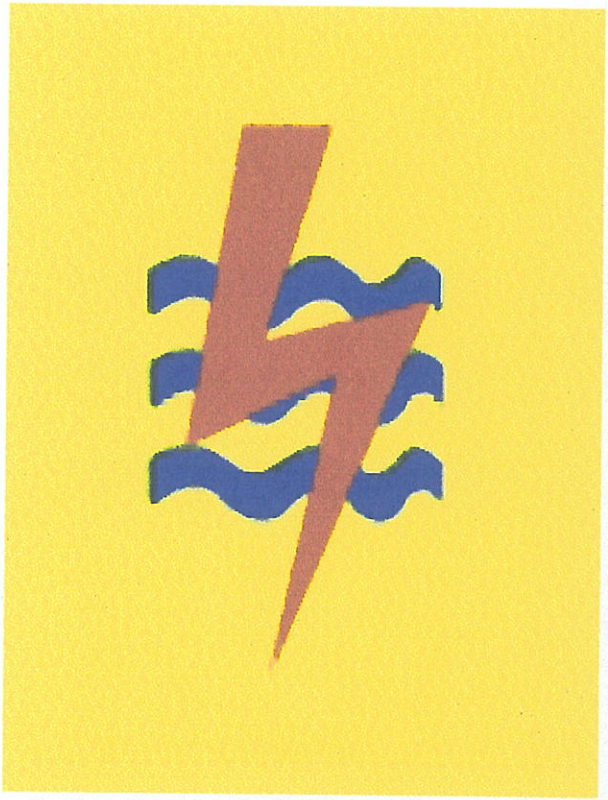
Identitas merupakan suatu wahana komunikasi kepada segenap pegawai perusahaan atau anggota organisasi, para pemilik saham, para agen, konsumen, lembaga-lembaga keuangan dan kaitan dengan organisasi / perusahaan. (M.L. Anggoro, 2000: 280-283)

PT. PLN (Persero) mempunyai logo atau lambang yang dijadikannya sebagai identitas perusahaan dengan tujuan agar konsumen atau publik pada umumnya mudah mengenal dan mengingat perusahaan. Adapun logo yang dimiliki PT. PLN adalah bentuk "petir" yang telah lama digunakan oleh PT. PLN berserta satuannya.

Selanjutnya bentuk logo PT. PLN (PERSERO) DJBB dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1

Logo PT. PLN (PERSERO) DJBB



Sumber : Company Profile PT. PLN (Persero) DJBB

1.4. Lambang PT. PLN (Persero) DJBB

Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambang perusahaan. Lambang mempunyai arti penting karena lambang merupakan identitas bagi setiap perusahaan.

Lambang petir/kilat telah lama digunakan oleh PT. PLN dan satuannya. Penggunaan lambang PT. PLN menurut surat keputusan No. 13/DIR/1976 adalah :

1. Gambar lambang PLN tercantum dalam suatu bidang datar
   a. Berwarna kuning keemasan
   b. Berbentuk segiempat. Berskala ukuran lebar : Panjang = 3:4
   c. Tanpa garis pinggir bila diperlukan penggambaran segi empat dapat digunakan garis pinggir sebagai batas.
   d. Tanpa tulisan listrik lambang ataupun tulisan lain di dalamnya.
2. Gambar atau lambang PLN terdiri dari :
   a. Petir atau kilat yang berbentuk atas tebal dan meruncing di sebelah berwarna merah darah dan memotong atau menembus ketiga garis gelombang.
   b. Tiga buah gelombang yang terbentuk sinusoida (dua setengah perioda), berwarna biru laut, tersusun secara sejajar dalam arah mendatar, terletak ditengah-tengah segi empat pada dasar kuning keemasan.
3. Gambar atau lambang diartikan senagai berikut :
   a. Petir atau kilat melambangkan tenaga listrik yang terkandung didalamnya.
   b. Gelombang yang digunakan dalam lambang PLN karena segala macam tenaga (energi) dapat dinyatakan sebagai gelombang (cahaya listrik, akuistik, dll).

Kegiatan PLN antara lain mencakup konversi segala macam tenaga (energi) menjadi tenaga listrik.

c. Tiga buah gelombang sejajar diartikan 3 sikap karyawan PLN dalam melaksanakan tugas negara bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat. Artinya yang lain bahwa pelaksanaan distribusi tenaga listrik harus serempak.

4. Warna lambang diartikan sebagai berikut:

a. Warna kuning keemasan melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, serta agunganya kewajiban PLN.

b. Warna merah darah melambangkan keberanian dan dinamika dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran pembangunan.

c. Warna biru laut melambangkan kesetiaan dan pengabdian pada tugas untuk menuju dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti dinyatakan dalam Peraturan pemerintah No 18 tahun 1972.

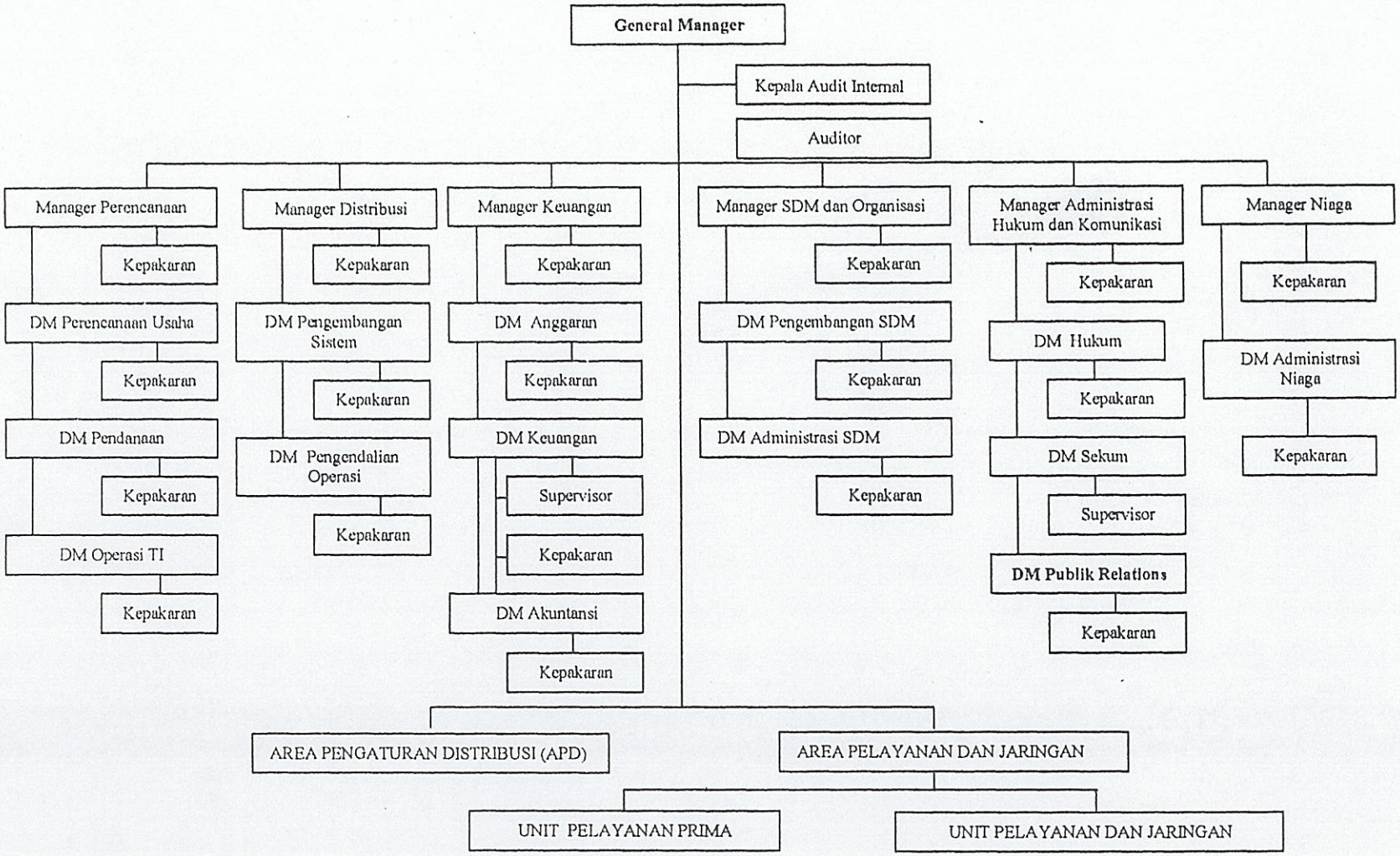
1.5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahan merupakan suatu gambaran yang menunjukan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau anggota. Struktur organisasi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat merupakan organisasi garis, fungsional, dan staff jenjang manajemen, meliputi unsur pimpinan, unsur pengawasan, unsur pelaksana, selain itu ada juga control interen yang berada dibawah serta tanggung jawab langsung kepada konsumen, dapat dilihat secara keseluruhan bahwa susunan organisasi di PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jawa Barat sebagai berikut :

A. Unsur Pimpinan adalah General Manager
B. Unsur Pembantu Pimpinan yang meliputi bidang-bidang :
    1. Perencanaan dan Pengembangan Usaha
    2. Distribusi
    3. Niaga
    4. Keuangan
    5. Organisasi dan SDM
    6. Administrasi, Hukum dan Komunikasi
C. Unsur Pelaksanan, meliputi :
    1. Cabang /Unit
    2. Area

Untuk lebih jelas Struktur Organisasi PT PLN (Persero) UBD Jawa Barat dan Banten dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut :

Gambar 1.2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PT PLN (Persero) Distrbusi Jawa Barat dan Banten



Sumber : Company Profile PT PLN (Persero) Distrbusi Jawa Barat dan Banten

1.6. Job Description

Dalam tataran praktisnya, masing-masing bagian memiliki *job description* yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

A. General Manager (GM)

1. Pemimpin PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten
2. Membentuk Area Pelayanaan dan Jaringan (APJ) yang membawahi Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ), Unit Jaringan (UJ).
3. Menetapkan Formasi Jabatan dan Informasi Tenaga Kerja Manajer bidang dan Kepala Audit Internal.
4. Menetapkan formasi jabatan dan formasi kerja Manajer Area Pelayann dan Jaringan (APJ) dan Area Pengatur Distribusi (APD).

B. Bidang Perencanaan dan pengembanganUsaha

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana keputusan direksi No. 28/010/DIR/2001, manajer perencanaan dan pengembangan usaha di Bantu oleh Deputi Manajer Perencanaan Perusahaan, Deputi Manajer Pendanaan dan Jabatan Kepakaran di bidang perkembangan usaha serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan informasi tenaga kerjanya di tetapkan General Manajer.

1. Deputi manajer Perencanaan Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan perencanaan *corporate (business plan)* serta rencana kerja dan angggaran

perusahaan dari Unit Bisnis Distribusi serta melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja.

2. Deputi Manajer Pendanaan bertanggung jawab atas penyediaan sumber dana untuk mendukung rencana kegiatan investasi dan operasi, melakukan analisa justifikasi investasi serta menyiapkan penerbitan SKKi dan SKKo untuk penyusunan skala prioritasnya.
3. Kepakaraan Pengembangan Usaha bertanggung jawab atas penyusunan rencana pengembangan usaha / analiansi usaha sesuai kaidah bisnis yang sehat.

C. Bidang Distribusi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan bertanggung jawab sebagaimana Keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, Manager Distribusi dibantu oleh Deputi Manager Perencanaan Sistem, Deputi Manager Operasi Distribusi, dan jabatan kepakaran di bidang Pengembangan Konstruksi, Konstruksi Listrik Pedesaan, Metering dan Proteksi, Telekomunikasi dan sistem serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan format tenaga kerjanya ditetapkan General Manager.

1. Deputi Manager Pengembangan Sistem bertanggung jawab atas perencanaan sistem distribusi yang andal dan kebutuhan gardu induk untuk memenuhi kebutuhan beban, serta upaya penurunan susut distribusi (susut teknis).
2. Deputi Manager Pengendalian Operasi bertanggung jawab atas perencanaan sistem pengoperasian jaringan distribusi berdasarkan standar pelaksana kegiatan operasi yang aman, handal dan efisien.

3. Kelompok Kepakaran Enginering dan Logistik,meliputi :
   a. Kepakaran Marketing dan Proteksi bertanggung jawab atas prosedur dan mekanisme, koordinasi sistem proteksi dan metering serta menyiapkan spesifikasi teknik peralatan metering dan proteksi.
   b. Kepakaran Scada dan Telekomunikasi bertanggung jawab atas perencanaan sistem operasional telekomunikasi dan scada pada sistem distribusi 20 VK.
   c. Kepakaran Pemeriksa dan Penggunaan Tenaga Listrik (PPTL) bertanggung jawab atas tersedianya program PPTL.
   d. Kepakaran Peningkatan Kinerja Operasi bertanggung jawab atas rekomendasi peningkatan kinerja operasi distribusi.
   e. Kepakaran Kualitas Peralatan Listrik bertanggung jawab atas rekomendasi penggunaan peralatan listrik.
   f. Kepakaran Pengembangan Konstruksi bertanggung jawab atas tersedianya standar konstruksi dan spesifikasi teknis untuk rencana pengembangan sistem distribusi.
   g. Kepakaran Logistik bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan tentang pola operasional pergudangan untuk kelancaran tersedianya material untuk mendukung pembangunan konstruksi.

D. Bidang Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaiman Keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, Manajer keuangan di ketuai oleh deputi Manajer Akutansi dan jabatan kepakaran di bidang analisa dan evaluasi sistem Keuangan serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan formasi kerjanya ditetapkan General Manager.

1. Deputi Manajer Pengendalian Anggaran bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dan *monitoring* penggunaan data.
2. Deputi Manajer Pengolahan Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan dan arus kas secara akurat serta melaksanakan pengembangan sistem manajemen keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat mengelola keuangan yang menggunakan serta menyiapkan data untuk laporan keuangan.
3. Deputi manajer Akutansi bertanggung jawab dalam menyiapkan informasi akutansi yang akurat dan tepat waktu untuk semua pihak dan membantu manajemen dalam melaksanakan opersi perusahaan secara efisien dan efektif.
4. Kepakaran Keuangan bertanggung jawab atas merecanakan pola pengelolaan dana yang menguntungkan serta melakukan analisa dan evaluasi keuangan.

E. Bidang Organisasi dan Sember Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagai mana keputusan Direksi No 28/ DIR/010/2001, Manajer Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Deputi Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dan jabatan kepakaran di bidang manajemen Sumber Daya Manusia serta Jabatan Operatif yang uraian jabatan dan informasi tenaga kerjanya ditetapkan General Manager.

1. Deputi Manajer Administrasi Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan penghasilan dan emolument, kesejahteraan dan kesehatan pegawai serta pensiunan dan system penggelolaan data, penyajian informasi, dan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pegawai yang aktual.
2. Deputi Manajemen Pengembangan sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompeten melalui jenjang karir yang jelas.

Kesepakatan Manajemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas pengembangan system sumber daya manusia

F. Bidang Administrasi, Hukum dan Komunikasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana Keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, Manajer Administrasi, Hukum dan Komunikasi di bantu oleh Deputi Manajer Sekertariat dan Umum, Deputi Menejer Hukum, Deputi Manajer Publik Relations dan Jabatan Kepakaran di bidang Perencanaan Sarana Kerja, Telekomunikasi dan K3, Perencanaan Sasaran Gedung/ Bangunan dan Sasaran Penunjang serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan General Meneger.

1. Menyusun kebijakan pengelolaan komunikasi kemasyarakatan dan pelanggan baik internal maupun eksternal.
2. Menyusun kebijakan dan mengelola fasilitas kerja, sistem pengamanan dan manajemen kantor.
3. Menyusun kebijakan K3, Lingkungan dan *Community development*.
4. Menyusun kebijakan administrasi.
5. Menyusun dan mengkaji produk-produk hukum dan peraturan-peraturan perusahaan.
6. Memberi advokasi dalam bisnis energi listrik dan ketenagakerjaan.
7. Menyusun standar fasilitas kantor.
8. Mengelola aset tanah dan bangunan serta saran kerja.
9. Mengelola kesekretariatan dan rumah tangga kantor induk.
10. Menyusun laporan menejemen dibidangnya.

G. Bidang Niaga

Dalam melaksanakan tugas pokok dantanggung jawab sebagaimana keputusan Direksi No.28/010/DIR/2001, manajer Niaga dibantu oleh Deputi Manajer Administrasi Niaga dan jabatan kepakaran di bidang Bisnis proses dan Sistem Prosedur Pelayanan, Regulasi pelayanan dan P2TL, sistem Pelayanan Pelanggan Potensial, Sistem Pelayanan Pelangan Umum, Pengembangan Pemasaran dan Produk unggulan, riset dan Intelegent pasar, negosiasi dan Transaksi Niaga, DSA dan Pentaripan serta jabatan operatif yang uraian jabatan dan informasi tenaga kerjanya ditetapkan General Manager.

1. Deputi Manajer Administrasi Niaga bertanggung jawab atas pencapaian kinerja niaga (rasio operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan, dan susut tenaga listrik) dan pengaturan transaksi niaga dan kontrak bisnis yang dilaksanakan di UPP, UPT / Cabang, AREA yaitu transaksi jual / beli / produksi.
2. Kelompok kepakaran Pengembangan Sistem Pelayanan yang meliputi :
   a. Kepakaran Bisnis Proses dan Sistem Prosedur Pelayanan bertanggung jawab atas pembuatan bisnis proses unit pelaksana, antar unit pelaksana dan pembuatan sistem dan prosedur pelayanan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
   b. Kepakaran Regulasi Pelayanan bertanggung jawab atas penyiapan standar, regulasi pelayanan dan melaksanakan monitoring / evaluasi untuk urusan penyempurnaan atau perbaikan standard dan regulasi pelayanan.

c. Kepakaran Sistem Pelayanan Pelanggan Potensial bertanggung jawab atas tersedianya sistem pelayanan dan memfasilitasi UPP/UPT/Cabang dan AREA dalam penyelenggaraan pelayanan dan kontrak bisnis dengan pelanggan potensial untuk pencapaian kepuasan pelangggan dan target peningkatan pendapat.

d. Kepakaran Sistem Pelayanan Pelanggan Umum bertangggung jawab atas tersedianya sistem pelayanan dan memfasilitasi UPP/UPT/ Cabang dan AREA dalam menyelenggarakan pelayanan dan konrak bisnis dengan pelangggan umum untuk pencapaian kepuasan pelanggan dan target peningkatan pendapatan.

e. Kepakaran Riset Kepuasan Pelanggan beranggung jawab atas penyelenggaraan riset/survey kepuasan pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan guna peningkatan pelayanan pelanggan.

f. Kepakaran Peningkatan Kompetensi Pelayanan dan Niaga bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi pelayanan dan niaga unit-unit pelaksana dalam rangka pencapaian kinerja niaga (rasio operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan dan susut).

3. Kelompok Kepakaran Pengembangan Niaga yang meliputi :

   a. Kepakaran pengembangan Pemasaran dan Produk Unggulan bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan pemasaran oleh unit pelaksana dengan memfasilitasi dan menyiapkan inovasi/produk unggulan untuk pencapaian target penjualan / pendapatan dan kepuasan pelanggan.

   b. Kepakaran Riset dan Intelegent pasar bertanggung jawab atas penyelenggaraan riset dan intelegent pasar untuk mengetahui dan rencana pengembangan pasar untuk meningkatkan penjualan/pendapatan dan kepuasan pelanggan.

   c. Kesepakatan Negosiasi dan Transaksi Niaga bertanggung jawab atas pelaksanaan negosiasi dan transaksi niaga/kontrak bisnis dengan pihak eksternal UBD dan memfaslitasi transaski niaga kontrak bisnis di unit pelaksana.

   d. Kepakaran Tarif/Harga bertanggung jawab atas pembuatan rumusan dan kajian pentaripan niaga yang dapat menguntungkan perusahaan.

   e. Kepakaran P2TL/Penertiban Niaga bertanggung jawab atas pengaturan pelaksanaan P2TL/Penerbitan Niaga dalam rangka pencapaian peningkatan target niaga (rasio operasi, umur piutang,pendapatan, penjualan dan susut tenaga kerja).

f. Kepakaran Peningkatan Produktivitas (EDP) bertanggung jawab atas peningkatan produktivitas (EDP) unit-unit pelaksana dalam pencapaian kinerja niaga (rasio operasi, pendapatan penjualan dan susut tenaga kerja)

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

H. Area Pelayanan dan Jaringan

Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi serta membuat laporan atas pencapaian pendapatan penjualan tenaga listrik, pelayanan pelanggan, pengoperasian, pemilihan jaringan, distribusi di daerah kerja secara efisian dengan mutu dan keandalan yang baik untuk kinerja unit.

I. Area Pengaturan Distribusi

Merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi serta membuat laporan atas kegiatan operasi pengaturan jaringan distribusi di daerah kerja secara efisien dengan mutu keandalan yang baik untuk mencapai kinerja unit.

1.7. Sarana Dan Prasarana

Untuk menunjang aktivitas kerja di bagian Struktur Organisasi PT PLN (Persero) DJBB tersedia sarana dan prasarana sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Sarana dan prasarana PT PLN (Persero) DJBB

No	Nama Fasilitas Kerja	Jumlah	Satuan	Penempatan
1 .	Komputer Program Windows XP	5	Unit	Operasional Humas
2	Komputer Program Windows XP	1	Unit	Deputy Manager Komunikasi
3	Komputer Program Windows XP	2	Unit	Operasional PKBL
4	Komputer Program Windows XP	3	Unit	Operasional Perpustakaan
5	Laptop	1	Unit	Operasional Humas
6	Printer HP	3	Unit	Operasional Humas
7	Printer HP	2	Unit	Operasional PKBL
8	Printer HP	1	Unit	Deputy Manajer Komunikasi
9	Printer HP	1	Unit	Operasional Perpustakaan
10	Camera Digital	3	Unit	Operasional Humas
11	Camera Non Digital	3	Unit	Operasional Humas
12	Handycam	2	Unit	Operasional Humas
13	Peralatan Audiovisual :			
	-Televisi 29 "	1	Unit	Operasional Humas
	-DVD Player	2	Unit	Operasional Humas
	-VCD Player	1	Unit	Operasional Humas
14	Peralatan Audio	1	Unit	Operasional Humas

Sumber : Data Humas PT PLN (Persero) DJBB (print out)

1.8. Lokasi dan Waktu PKL

1.8.1. Lokasi PKL

Pelaksanaan praktek kerja lapangan di lakukan di bagian HUMAS PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dan Banten, jalan Cikapundung Barat No 2 Bandung.

1.8.2. Waktu PKL

Pelaksanan praktek kerja lapangan di lakukan terhitung tanggal 2 Agustus 2004 sampai dengan 31 Agustus 2004, setiap hari senin – jum'at di mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.